

**PELAYANAN PEMBUATAN SURAT TANAH DI KANTOR CAMAT
KECAMATAN KAMPAR KIRI**

ABSTRAK

NANANG ANDLI

Kata Kunci : Pelayanan, Pelayanan Publik, Surat Tanah

Dalam Pasal 221 ayat (1) pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Tugas pokok pemerintahan di ringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*), pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelayanan pembuatan surat tanah pada Kantor Camat Kecamatan Kampar Kiri. Untuk mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi pelayanan pembuatan surat tanah di kecamatan Kampar Kiri. Teori yang digunakan adalah, Pemerintahan, Pelayanan, Pelayanan Publik dan Kecamatan. Hasilnya adalah Pelayanan Pembuatan Surat Tanah di Kantor Camat Kecamatan Kampar Kiri Belum maksimal karena masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap transparansi biaya dan lama pengurusan surat tanah tersebut. Fakto-faktor yang mempengaruhi pelayanan pembuatan surat tanah di kecamatan Kampar Kiri yaitu Dari pihak kantor camat dan kantor desa yaitu terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia sehingga pelayanan tidak maksimal dilakukan dan Dari masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan, wawasan masyarakat tentang *Standard Operasional Prosedur* (SOP) pembuatan surat tanah sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengurus surat tanah

THE SERVICE OF MAKING LAND LETTER IN DISTRICT OFFICE

KAMPAR KIRI DISTRICT

ABSTRACT

NANANG ANDLI

Keywords: Service, Public Service, Land Letter

In Article 221 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 on Regional Government, it is said that the Regencies / Municipalities shall establish sub-districts in order to improve the coordination of government administration, public service, and empowerment of village / kelurahan community. The main task of government is concise into 3 (three) essential functions, namely: service, empowerment, and development, service will bring about justice in society, empowerment will encourage community independence, and development will create prosperity in society. The purpose of this study is to find out the service of making land letter at the kampar kiri district. To know the factors that influencing the service of making land letter in Kampar Kiri district. The theory used are, Government, Services, Public Services and Districts. The result is the Service of making land letter in the district office of Kampar Kiri not maximal because there are still many complaints from the public on the transparency of the cost and the length of the process of arrangement the land letter. Factors that influence the service of making land letter in Kampar Kiri district is from the office of the district office and the village office that is the limited number of human resources available so that the service is not maximally done and From the community that is the lack of knowledge, public insight into the Standard Operating Procedure (SOP) for making land documents so that many people still do not manage land documents.